

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
DALAM MENGATASI KRISIS AIR BERSIH DI KOTA TERNATE**Mohbir Umasugi<sup>1</sup>, Anfas<sup>2</sup>, Muhammad Darsan Hi. Adam<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Terbuka,E-mail: <sup>1</sup>mohbir@ecampus.ut.ac.id, <sup>2</sup>Anfas\_st\_mm@ecampus.ut.ac.id, dan <sup>3</sup>muhammaddarsan50@gmail.com**ABSTRAK**

Kebutuhan air bersih di perkotaan makin meningkat sedangkan ketersediaan sumber air kian berkurang, sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis air tersebut dengan dikeluarkannya kebijakan yang variatif. PDAM diharapkan merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan mengantisipasi krisis air bersih di Kota Ternate yang kian mengkhawatirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan PDAM untuk mengidentifikasi dampak krisis air bersih di Kota Ternate, sehingga untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap krisis air bersih. Metode analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PDAM dalam mengatasi krisis air bersih sudah maksimal, namun kesadaran dan kepedulian masyarakat masih minim sehingga perlu adanya inovasi mencari sumber air bersih di luar Kota Ternate untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat.

**Kata kunci :** Kebijakan, PDAM, Pelayanan, Krisis, dan Air Bersih.

**ABSTRACT**

*The need for clean water in urban areas is increasing while the availability of water resources is decreasing, various efforts have been made by the government in overcoming the water crisis by issuing various policies. The PDAM is expected to formulate policies and implement policies related to anticipating the crisis of clean water in Ternate City which is worryingly worrying. The purpose of this study is to find out the implementation of PDAM policies to identify the impact of the clean water crisis in Ternate City, so that the results of this study are expected to be useful for local governments in improving public services for the clean water crisis. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive. Qualitative descriptive is a method used to explore findings in the field. The results showed that the PDAM's policy in overcoming the clean water crisis had been maximized, but the public awareness and concern was still minimal, so innovation was needed to find clean water sources outside Ternate City to meet the primary and secondary needs of the community.*

**Keywords :** Policies, PDAMs, Services, Crises, and Clean Water.

**1. PENDAHULUAN**

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Untuk itu air perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga mampu mendukung kehidupan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa kini maupun di masa mendatang. Kurniawan (2008:1).

Kebutuhan air yang tak terbatas terjadi di kawasan perkotaan, sebab laju pertumbuhan kota sangat pesat selain sebagai kebutuhan domestic juga untuk memenuhi kebutuhan berupa industri, usaha perkotaan (perdagangan/pertokoan) dan lainnya. Melihat besarnya peran dan fungsi air bersih serta untuk mengantisipasi semakin tingginya kebutuhan air khususnya air bersih di perkotaan, maka perencanaan sistem air bersih harus mendapat perhatian yang serius.

Kota Ternate saat ini dan sedang dilanda krisis air

bersih, bahkan diperkirakan cadangan air yang dimiliki Kota Ternate hanya sampai pada tahun 2030. Olehnya itu, pemerintah daerah perlu merencanakan kebijakan untuk menyelesaikan krisis air bersih tersebut. Di sisi lain sumber air bersih di Kota Ternate bergantung pada Akegaale maka diperlukan alternatif potensial dalam mengatasi kondisi keterbatasan air bersih.

Krisis air bersih ini sangat terasa terutama di tiga kecamatan padat penduduk antara lain Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, dan Kecamatan Ternate Utara. Ada beberapa persoalan yang berupa distribusi Air dari PDAM bergilir bahkan ada yang tidak dialiri Air PDAM sampai dengan bulan, sedangkan yang terjadi di Kecamatan Ternate Utara persoalannya merata karena yang terjadi semua kelurahan Air yang dialiri PDAM rasanya salobar (asin).

Terdapat beberapa indikasi terjadinya krisis air bersih di tiga kecamatan tersebut, yaitu makin tingginya aktivitas kehidupan masyarakatnya yang sangat dinamis sedangkan

sumber air sangat terbatas. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Ternate, maka permintaan air bersih akan terus meningkat. Dari segi kuantitas ternyata air bersih yang sampai ke rumah dengan debit yang kecil dan terasa asin (salobar), dan dari segi kontinuitas air bersih sering tidak mengalir. Kondisi Kota Ternate yang sudah mengkhawatirkan ini, maka pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi kebijakan untuk mengantisipasi krisis air

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Kebijakan**

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan di terjemahkan dari kata policy yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Said Abidin (2002 : 35) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai berikut "Kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat". Sedangkan menurut Thomas R, Dye yang dikutip Riant Nugroho, (2004 : 3-4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka lakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda.

Kemudian Harold Laswell mendefinisikan sebagai kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrick mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Willian N Dunn (2000:89) mengatakan kebijakan publik merupakan rangkaian panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Rose dalam Winarno (2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam keputusan itu sendiri. Sedangkan Anderson (1979) dalam Winarno (2002:16) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan konsep kebijakan, yang mana mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan

oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh perintah.

4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian kebijakan diatas, tampaklah bahwa suatu kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing.

### **2.2 Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure).

Lebih lanjut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:
  - a. Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusia yang melekat

keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

- b. Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
  - c. Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
  - d. Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
  - e. Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*); berhubungan dengan kesediaan *dari* para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
  4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*); berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara *implementasi* kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pressman dan Wildavsky, (1978:21) berpendapat bahwa Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Lebih lanjut Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : "*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi Implementasi dapat

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Abdul Wahab, (2004 : 65) juga menjelaskan mengenai implementasi yang menurutnya "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Sedangkan Willyam Dunn (2003: 132) berpendapat bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

### 3. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan PDAM untuk mengidentifikasi dampak krisis air bersih di Kota Ternate, sehingga untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap krisis air bersih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari kantor PDAM. Sedangkan teknik pengumpulan data primer yaitu teknik yang melihat secara nyata di lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Direktur PDAM dan staf, anggota DPRD Kota Ternate dan tokoh masyarakat.

Metode analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Kebijakan Mengatasi Krisis Air Bersih di Kota Ternate

Sebagai kota perdagangan dan jasa, dinamika Kota Ternate tidak bisa dibendung. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti peningkatan aktivitas sosial ekonomi semakin mendorong keterdesakan ruang yang implikasi pada lingkungan. Salahsatu fenomena yang muncul adalah krisis air bersih. Di satu sisi air sebagai sumber kehidupan kian meningkat pemakaiannya, di sisi lain wilayah yang menjadi kawasan produksi air tanah justru semakin berkurang, pendekatan teknis saja tidak bisa menjawab persoalan air bersih yang di hadapi, maka di butuhkan kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan perilaku secara

langsung terhadap pemanfaatan air bersih.

Untuk saat ini Kebijakan Pemerintah Kota Ternate untuk mengantisipasi krisis air bersih di Kota Ternate maka dilakukan revitalisasi beberapa wilayah yang tentu selama ini menjadi daerah konservasi, seperti catchment area di kecamatan Ternate Utara, tepatnya di Kelurahan Sangaji kompleks Fatcei, dibangun sumur serapan sebanyak 1000 unit sumur tujuannya mengembalikan kondisi air seperti semula.

Bahkan kebijakan dari sisi tata ruang di daerah ketinggian juga turut diatur sehingga meminimalisir tingkat kepadatan permukiman di ketinggian sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan air yang memadai. Di sisi lain, kebijakan yang diambil dari pihak perusahaan saat ini hanyalah mengurangi operasi pompa dari 10 pompa menjadi 6 pompa agar air dari sumber Akegaale tidak payau (asin), namun dampaknya sambungan aliran air dalam pelayanan sumber Akegaale tidak jalan normal, dikarenakan pengurangan operasi pompa, kemudian kebijakan yang di ambil di beberapa daerah ketinggian yang tersebar di 3 kecamatan yang airnya bergilir tersebut.

Selain kebijakan tersebut Perusahaan Daerah Air Minim(PDAM)Kota Ternatejugamerencanakanproyek Danau Laguna untuk dioperasikan karena kapasitas yang diperkirakan mencapai 70 liter perdetik.Dengan asumsi jika proyek yang dicadangkan di Danau Laguna tersebut telah selesai dan dioperasikan maka masalah bergilir dapat dikurangi secara signifikan.

Kebijakan lain yang dilakukan adalah sedang dilakukan pembuatan 5 sumur baru oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) yang di prediksi rata-rata mendapatkan 10 liter perdetik untuk 1 sumur maka 50 liter perdetik untuk 5 sumur yang dibangun dan ditambah 70 liter perdetik maka aka ada 120 liter perdetik tambahan sumber air, namun nantinya tambahan ini masih belum cukup juga dikarenakan PDAM kekurangan air kurang lebih 150 liter perdetik.

Tabel 1  
 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Produksi Air

No	Intalasi / Lokasi	Kapasitas	Keterangan
1	Akegaale / Toloko	30 l / d	Peningkatan
2	Kalumpang / Skeep	30 l / d	Baru
3	Ubo-Ubo	20 l / d	Baru
4	Kalumata / Falaraha	12 l / d	Baru
5	Gambesi / Sasa	30 l / d	Baru
Jumlah		122 l / d	

Sumber: Diolah dari PDAM Kota Ternate, 2018.

Jika dilihat dari gambar 1.1 tersebut maka menandakan bahwa pihak PDAM Kota Ternate sudah maksimal menambah sumber produksi air bersih namun, kendalanya adalah belum didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai sehingga untuk memenuhi seluruh kebutuhan air bersih baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

#### 4.2. Kebijakan Penghematan Penggunaan Air Bersih

Selain upaya penambahan sumber air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Ternate, pihak PDAM juga telah mengeluarkan kebijakan internal berupa penghematan penggunaan air bersih dengan cara menekan angka pemakaian dari angka semula 28 kubik perbulan turun menjadi 23 sampai 20 meter kubik perbulan.

Kebijakan ini dilakukan dengan asumsi jika penghematan air maka pemakaian air yang boros oleh sebagian pelanggan bisa tersuplai ke pelanggan lain. Riil kebijakan ini berupa dengan penyesuaian tarifkhusus untuk pemakaian di atas 20-40 meter kubik.Kebijakan dengan menaikkan tariff air bersif ini maka mencoba menggiring pola piker masyarakat selaku pengguna air bersih, dengan makin mahalnya tariff dasar air tersebut maka langkah penghematan pasti disadari oleh masyarakat.

Selain itu, kebijakan dalam mengatasi persoalan air bersih tersebut maka pihak PDAM telah melakukan koorditas lintas sector kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ternate untuk membicarakan krisis air bersih tersebut maka dikeluarkan beberapa kebijakan yaitu; pertama melakukan pemahaman kepada masyarakat untuk memanfaatkan air yang seefisien mungkin,kedua memperbanyak sumur resapan, dan ketiga saat ini pemerintah kota Ternate melalui sekertaris daerah sedang menyusun roodmap pengelolah sumber daya air, pengelolah sumber daya air di targetkan sampai 2030.

#### 4.3. Kebijakan RISPAM

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dengan maksud menutupi krisis air bersih maka koordinast horizontal yang dilakukan oleh pihak PDAM terus ditingkatkan, sehingga telah melahirkan sebuah kebijakan berupa Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (RISPAM) melekat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, kebijakan ini lebih difokuskan pada suatu kawasan yang meliputi bagaimana merencanakan induk sistem pengelolaan air minum yang terpadu, mulai dari sumber, sistem, dan distribusi sampai ke masyarakat. RISPAM merekomendasi dan menginvestasi sistem-sistem yang sudah dituangkan dalam program, kemudian pengelolaan di serahkan ke PDAM selaku operator.

#### 4.4. Minimnya Dukungan Kebijakan Anggaran

Kota Ternate yang telah mengalami krisis air bersih yang sudah mengkhawatirkan tersebut selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak PDAM selaku penanggungjawab terhadap distribusi air bersih. Namun terkendala masalah pembiayaan atau minimnya support kebijakan anggaran dari pemerintah Kota Ternate. Hal ini bisa dilihat dari beberapa roadmap yang telah dilakukan namun karena tidak didukung dengan anggaran maka roadmap tersebut

diperkirakan selesai hingga 2030 karena dilakukan secara step by step. Masalah lain yang di hadapi adalah biaya operasional yang tidak berimbang, maka PDAM berwacana menaikkan tariff dasar air, namun mendapat penolakan dari eksekutif dan legislatif, konsekuensinya pemerintah daerah harus subsidi dana ke perusahaan daerah.

Upaya untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dalam rangkamenutupi biaya operasiobal yang makin meningkta tersebut maka pihak PDAM meminta dukungan kebijakan anggaran dari pemerintah daerah berupa supsidi anggaran setiap tahun anggaran dengan besaran anggaran yang variatif. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 pihak PDAM hanya mendapatkan supsidi sebesar Rp 2 milyar dari usulan supsidi sebesar Rp 4 milyar. Meskipun sudah mendapatkan supsidi, namun pihak PDAM tetap tidak bisa menutupi biaya produksi, maka dengan berbagai macam pertimbangan akan dinaikkan tarid dasar air untuk menutupi biaya operasional.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwapenggunaan air di tiga Kecamatan yaitu kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara terlalu boros sedangkan cadangan air di Kota Ternate diperkirakan hanya sampai pada tahun 2030 maka dikeluarkan dibuatkan kebijakan penghematan. Riil kebijakan ini berupa dengan penyesuaian tarif khusus untuk pemakaian di atas 20-40 meter kubik. Kebijakan menaikkan tarif air bersih dimaksudkan mengajak masyarakat agar melakukan penghematan. Sedangkan kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya kebijakan RISPAM yang difokuskan pada kawasan tertentu yang meliputi bagaimana merencanakan induk sistem pengelolaan air minum yang terpadu, mulai dari sumber, sistem, dan distribusi sampai ke masyarakat.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak tersedianya debit air tanah yang tersedia di Kota Ternate, yang ada adalah produksi air yang dapat disalurkan per bulan. Peneliti telah berupaya mencari data tersebut di berbagai instansi namun tidak ditemukan sehingga menggunakan persepsi actor dan masyakat sebagai pengguna untuk dijadikan data penelitian.

### 5.2. Rekomendasi

Krisis air yang dialami tiga kecamatan di Kota Ternate merupakan masalah internasional yang ditandai dengan makin lajunya pertumbuhan penduduk, PDAM selaku penanggungjawab telah memaksimalkan kemampuannya untuk mengatasi krisis air bersih tersebut namun masalah yang paling mendasar adalah persepsi masyarakat bahwa masalah penanganan krisis air bersih hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Olehnya itu, perlu dukungan dan kesadaran dari masyarakat maka PDAM perlu menaikkan tariff dasar listrik sebagai upaya mengatasi krisis air bersih meskipun tidak menyelesaikan masalah. Selain itu, PDAM perlu berinovasi berupa mencari sumber air bersih baru di luar Kota Ternate untuk memenuhi kebuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. *Hakikat Pembangunan dan Perubahan*. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).
- D. Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Raja Grasindo.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, Dodi. 2008, *Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat*. Citra Umbara, Bandung.
- Pressman, J.L. and Wildavsky. 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angeles. University of California Press.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressinda. Yogyakarta.